SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan Oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik indonesia Nomor 29 tahun 2022 tentang Pernantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/0RT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pernilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2026 TENTANG TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemiiihan Umum Kabupaten Rokan Hulu sebagai Implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Rokan Hulu, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pernilihan Urnum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemiluan.

KETIGA : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU , termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Layanan PPID;
2. Layanan Pendidikan Pemilih;
3. Layanan Pengaduan Masyarakat;
4. Layanan Kerjasama;
5. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih; dan
6. Layanan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik.

KEEMPAT : Standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, untuk layanan:
   a. PPID;
   b. Pendidikan Pemilih; dan
   c. Pengaduan Masyarakat.
2. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pernilu dan Hukum, untuk layanan:
   a. Kerjasama; dan
   b. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Partai Politik
3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi untuk layanan berupa Layanan Pemutakhiran Data Pemilih.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Saparuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU

1. LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
	Persyaratan	Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan ketentuan
		1. Perseorangan: Menunjukkan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor. 2. Badan Publik: mengajukan surat permohonan dengan berkop lembaga dan bertanda tangan beserta stempel resmi. 3. Jam Pelayanan: Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-15.00 WIB.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Datang langsung: Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi Publik; 2. Daring: Pemohon mengakses portal/kanal layanan PPID dan mengisi formulir permohonan Informasi Publik secara elektronik; 3. Petugas pelayanan meregistrasi permintaan Informasi Publik dan memberikan nomor pendaftaran kepada Pemohon; 4. PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permintaan Informasi Publik; 5. Dalam hal permintaan Informasi Publik belum lengkap, PPID menyampaikan Surat Keterangan Tidak Lengkap kepada Pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan;

		6. Dalam hal permintaan telah lengkap, PPID memproses permintaan Informasi Publik dan berkoordinasi dengan unit kerja yang menguasai informasi; 7. PPID memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon mengenai diterima atau ditolaknya permintaan Informasi Publik sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan; 8. Jika permintaan dikabulkan, Informasi Publik diberikan dalam bentuk yang tersedia sesuai dengan ketentuan; 9. Jika permintaan ditolak, Pemohon menerima pemberitahuan penolakan disertai alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; 10. Pemohon menandatangani tanda terima Informasi Publik; 11. Proses selesai.
3.	Jangka waktu pelayanan	Pemeriksaan kelengkapan permintaan Informasi Publik dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permintaan Informasi Publik dicatat dalam buku register permintaan Informasi Publik. Pemberitahuan tertulis atas permintaan Informasi Publik diberikan: a. paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi Kelembagaan dan/atau Informasi Pemilu dan Pemilihan pada tahap penyelenggaraan yang telah berlalu; atau b. paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap, dalam hal permintaan berkaitan dengan Informasi

		Pemilu dan Pemilihan pada tahap yang sedang berjalan. Dalam hal informasi belum dikuasai, belum didokumentasikan, atau belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk Informasi yang Dikecualikan, pemberitahuan mengenai perpanjangan waktu diberikan secara tertulis kepada Pemohon Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif atas pelayanan permohonan Informasi Publik. Dalam hal diperlukan penggandaan dan/atau pengiriman salinan Informasi Publik, biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
5.	Produk pelayanan	Informasi Publik dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) dan/atau salinan fisik (hardcopy), sesuai dengan ketersediaan dan bentuk Informasi Publik yang dimohonkan.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. WhatsApp PPID : 0812-6697-8210 3. Instagram: @kpukabrokanhulu 4. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 5. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id/ 6. Tiktok: @kpurokanhulu 7. Twitter (X) : @KPUrohul 8. JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236} sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi

		Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wifi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang mempunyai pengetahuan terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi. 2. Pegawai yang memahami terkait Keterbukaan Informasi Publik. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon Informasi. 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Jagat Saksana.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat. 2. PEKPPP Mandiri. 3. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

2. LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	1. Kelompok Pemilih Strategis. a. Pra pemilih; b. Pemilih Pemula; c. Perempuan; d. Kelompok Marginal dan Penyandang Disabilitas; dan e. Agamawan. 2. Kelompok Rentan. a. Partisipasi pemilih rendah; b. Potensi pelanggaran pemilu tinggi; dan c. Daerah rawan konflik dan kekerasan. 3. Kelompok Sasaran Lain.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Focus Group Discussion (FGD); 2. Pendidikan dan pelatihan; 3. Seminar; 4. Webinar; 5. Siniar (Podcast); 6. Simulasi; 7. Gelar Wicara (Talk Show); 8. Ceramah; 9. Diskusi; 10. Pemanfaatan Media Sosial dan Media Digital lainnya; 11. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan 12. Metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan Informasi Pemilu/ Pemilihan dengan baik.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Jangka waktu/durasi pelaksanaan, publikasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan; dan

		2. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 3 hari kerja setelah kegiatan sosialisasi dan pendidikan dilaksanakan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1.Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 1. WhatsApp PPID : 0812-6697-8210 2. Instagram: @kpukabrokanhulu 3. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 4. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id/ 5. Tiktok: @kpurokanhulu 6. Twitter (X) : @KPUrohul JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

		Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU /V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Lokasi sosialisasi dan pendidikan pemilih; 2. Laptop/Komputer; 3. Handphone; 4. Printer; 5. Scanner; 6. Wifi/Jaringan Internet; 7. Meja dan Kursi; 8. Bahan sosialisasi dan pendidikan pemilih; 9. Alat peraga sosialisasi dan pendidikan pemilih; 10. Air minum dan kudapan; 11. Suvenir; 12. Area Parkir; 13. Toilet; dan 14. Sarana danprasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Memiliki kompetensi menyampaikan materi sosialisasi secara resmi kepada Publik. 2. Memiliki kemampuan memahami substansi materi sosialisasi. 3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (public speaking). 4. Memiliki kemampuan mengorganisir acara (event organizing). 5. Memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	1. Jumlah pelaksana kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Minimal 5 (lima) orang.

6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Masyarakat sebagai subjek dan objek sosialisasi akan dijamin haknya untuk mendapat pengetahuan dan informasi terkait demokrasi dan kepemiluan. 2. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline / datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Jagat Saksana.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri. 3. Monitoring dan evaluasi Internal per Triwulan

3. LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	Pengguna layanan mengisi form pengaduan masyarakat dengan memberi identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat, partai politik/badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, alamat email dan menunjukkan Kartu Identitas (perseorangan: Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Surat Izin Mengemudi (SIM)/Paspor) ditujukan ke: 1. KPU Kabupaten Rokan Hulu Jl. Imam Bonjol No.48 Pasir Pengaraian Kelurahan Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. 2. Jam pelayanan: • Layanan tatap muka: Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–15.00 WIB. • Layanan pengaduan secara daring dapat disampaikan selama 24 (dua puluh empat) jam. • Pengaduan yang diterima melalui kanal daring di luar jam pelayanan ditindaklanjuti pada hari kerja berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Datang langsung: Pemohon mengisi formulir permohonan pengaduan masyarakat; Daring (Online): Pemohon mengakses tautan/link Layanan pengaduan masyarakat dan mengisi formulir elektronik yang disediakan. 2. Petugas pelayanan meregistrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. 3. Petugas pelayanan memberikan bukti tanda terima kepada pemohon. 4. Petugas pelayanan memproses permohonan dan berkoordinasi dengan divisi/sub bagian terkait. 5. Proses selesai.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Pengaduan yang diterima pada jam pelayanan diregistrasi pada hari yang sama. 2. Pengaduan yang diterima di luar jam pelayanan diregistrasi pada hari kerja berikutnya. 3. Respons awal/tindak lanjut awal terhadap pengaduan diberikan paling lambat 1 × 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pengaduan diregistrasi. 4. Penyelesaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan substansi pengaduan, tingkat kompleksitas, dan hasil koordinasi dengan unit kerja terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Layanan Pengaduan masyarakat.

6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan masyarakat 2. WA PPID : 0821-7092-8811 3. Instagram: @kpukabrokanhulu 4. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 5. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id 6. Tiktok: @kpurokanhulu 7. Twitter (X) : @KPUrohul 8. JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 5. Publik Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;

		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

		Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wifi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan 11. prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan dan penyelenggaraan kepemiluan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan perundang-Undangan; 3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pengelolaan data dan informasi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam memberikan pelayanan informasi publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon. 2. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Jagat Saksana.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri, Monitoring dan evaluasi internal Triwulan.

4. LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi Identitas pemohon yang meliputi Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), dan nomor telepon seluler yang bisa dihubungi. 2. Syarat Pemilih Aktif: a. Warga Negara Indonesia (WNI). b. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun. c. Pemilih yang telah berubah status dari prajurit TNI atau anggota Polri menjadi sipil. d. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik. e. Pemilih usia di bawah 17 tahun yang sudah menikah. f. Pemilih Pindah Domisili (Pindah Masuk). g. Pemilih yang elemen datanya diperbaiki atau perubahan data pemilih. 3. Syarat Penghapusan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): a. Meninggal dunia. b. Pemilih ganda c. Belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah d. Pemilih pindah domisili (Pindah Keluar) e. Pemilih menjadi prajurit TNI. f. Pemilih menjadi anggota Polri

		g. Warga Negara Asing (WNA) h. Pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 4. Jam Pelayanan: a. Datang langsung: Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-15.00. b. Daring (Online): lx24 jam
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Datang langsung: Pemohon mengisi formulir permohonan perubahan data pemilih; Daring (Online): Pemohon mengakses tautan/link Layanan Pemutakhiran Data Pemilih, dan mengisi formulir elektronik yang disediakan. 2. Petugas pelayanan meregistrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan berkas. 3. Petugas pelayanan memberikan nomor register kepada pemohon sebagai bukti penerimaan. 4. Petugas pelayanan memproses permohonan dan berkoordinasi dengan divisi/ sub bagian terkait. 5. Paling lambat 10 hari kerja, Petugas pelayanan akan memberikan informasi apakah permohonan diterima atau ditolak; Jika diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan alasan tertentu. 6. Jika disetujui, pemohon akan diinformasikan lebih lanjut atas perubahan data pemilih yang diajukan. 7. Jika ditolak, pemohon akan menerima surat penolakan disertai alasan hukumnya. 8. Proses selesai.

3.	Jangka waktu pelayanan	1. Permohonan pemutakhiran data pemilih diproses sesuai dengan ketentuan dan jadwal pemutakhiran data pemilih yang berlaku; 2. Dalam hal diperlukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada instansi terkait, jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk memperoleh hasil verifikasi dan/atau klarifikasi tersebut.
4.	biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Pemutakhiran Data Pemilih.
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 2. WhatsApp PPID : 0812-6697-8210 3. Instagram: @kpukabrokanhulu 4. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 5. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id/ 6. Tiktok: @kpurokanhulu 7. Twitter (X) : @KPUrohul 8. JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun

		2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

		2022 Nomor 1160); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

		2023 Nomor 826); 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/ 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wifi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.

3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan peraturan perundang-Undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakanoleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	a. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data diri Pemohon; b. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data kependudukan Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan; c. Pelayanan dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, dan aksesibilitas Pemohon; d. Bagi masyarakat yang mengakses pelayanan secara tatap muka, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan Jagat Saksana.

8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat; 2. PEKPPP Mandiri; 3. Monitoring dan evaluasi internal per triwulan.

5. LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	1. Partai Politik; 2. Surat Penunjukan Admin SIPOL; 3. Surat Penunjukan Petugas Penghubung; 4. KTP dan KK Admin SIPOL dan Petugas Penghubung; 5. KTA Admin SIPOL dan Petugas Penghubung; 6. Akun SIPOL.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Menyiapkan Akun Sipol a. membuka akses pada laman KPU melalui alamat http://sipol.kpu.go.id b. Partai Politik yang telah memiliki Akun Sipol pada tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2024 maka dapat melakukan login pada aplikasi Sipol dengan memasukkan alamat e-mail dan password yang terdaftar; c. Partai Politik tingkat pusat yang belum memiliki Akun Sipol dapat mengajukan permohonan pembukaan akses Sipol. 2. Menyiapkan Dokumen Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan untuk dapat dipindai dan diunggah ke dalam Sipol. 3. Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berupa: a. Penambahan Data dan Dokumen Partai Politik;

		b. Perbaikan Data dan Dokumen Partai Politik; dan c. Penghapusan Data dan Dokumen Partai Politik. 4. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol sesuai dengan Indikator keabsahannya. 5. KPU Kabupaten Rokan Hulu melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol. 6. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir: a. MODEL BA VERMIN PEMUTAKHIRAN KPU KAB/KOTA PARPOL beserta Lampiran 1; dan b. Lampiran 2 MODEL BA.VERMIN. PEMUTAKHIRAN KPU KAB/KOTA PARPOL
3.	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik 6 (enam) bulan sekali/per semester.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Pemutakhiran Data Partai Politik.
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan / apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1. Kotak Saran dan Pengaduan masyarakat. 2. WhatsApp : 0813-7844-7525 3. Instagram: @kpukabrokanhulu

		4. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 5. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id 6. Tiktok: @kpurokanhulu 7. Twitter (X) : @KPUrohul 8. JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi

		Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

		Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/

		2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wifi/Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet, dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang Pelayanan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan peraturan perundang-Undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanandilaksanakan oleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan data Partai Politik.

		2. Dalamhal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline/datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Satuan Jagat Saksana.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat. 2. PEKPPP Mandiri. 3. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

6. LAYANAN KERJA SAMA

No.	Komponen	Uraian
Penyampaian Layanan (Service Point)		
1.	Persyaratan	1. Pengajuan persetujuan Nota Kesepahaman disampaikan melalui surat resmi KPU Provinsi kepada KPU RI; 2. Surat persetujuan Nota Kesepahaman dari Ketua KPU RI. 3. Instansi vertikal pemerintah pusat. 4. Pemerintahan Daerah. 5. Perguruan Tinggi yang terakreditasi. 6. Pihak lain yang terkait di bidang kepemiluan a. badan usaha; b. badan hukum; c. organisasi profesi; d. organisasi masyarakat; dan/ atau e. pihak lainnya yang berkedudukan di Indonesia.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Penjajakan Kerja Sama; 2. Perumusan Kerja Sama; 3. Penandatanganan Naskah Kerja Sama; 4. Pelaksanaan Kerja Sama; 5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama; 6. Perubahan Kerja Sama; 7. Pengakhiran Kerja Sama; 8. Pengembangan Program; dan 9. Pelaporan Kerja Sama.
3.	Jangka waktu pelayanan	1. Jangka waktu Pelayanan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kerja sama berakhir.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif.
5.	Produk pelayanan	Layanan Kerja Sama.

6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/ apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan secara tertulis melalui: 1.Kotak Saran dan Pengaduan Masyarakat. 7. WhatsApp PPID : 0812-6697-8210 8. Instagram: @kpukabrokanhulu 9. Facebook: KPU Kab Rokan Hulu 10. Website: kab-rokanhulu.kpu.go.id/ 11. Tiktok: @kpurokanhulu 12. Twitter (X) : @KPUrohul JDIH: https://jdih.kpu.go.id/riau/rokanhulu
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

		Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

		Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 /ORT.07-Kpt/01/ KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

2.	Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Handphone; 3. Printer; 4. Scanner; 5. Wi-fi/ Jaringan Internet; 6. Meja dan Kursi; 7. Air minum; 8. Area Parkir; 9. Toilet; dan 10. Sarana dan prasarana dapat diakses oleh kelompok rentan.
3.	Kompetensi pelaksana	1. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang PeLayanan Kerja Sama. 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan tentang kepemiluan dan peraturan Perundang-Undangan. 3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam pelayanan publik.
4.	Pengawasan internal	Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat Pelayanan. 2. Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal pelayanan yang telah ditentukan. 3. Pelayanan dilaksanakan oleh personel yang berkompeten serta mendapat penugasan. 4. Pelayanan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai, dan aksesibel.

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. KPU Kabupaten Rokan Hulu melindungi dan menjamin kerahasiaan isi dari Nota Kesepahaman. 2. KPU Kabupaten Rokan Hulu menjamin pelaksanaan, maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman dengan penuh tanggung jawab. 3. Jika terjadi perbedaan pendapat atau sengketa dalam pelaksanaan, KPU Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab untuk menyelesaikannya melalui musyawarah untuk mufakat. 4. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline / datang langsung, tersedia kamera CCTV, jalur evakuasi, titik kumpul, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Jagat Saksana.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat. 2. PEKPPP Mandiri. 3. Monitoring dan evaluasi internal per Triwulan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

CEPI ABDUL HUSEN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Saparuddin